



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eropa sebelum Revolusi Perancis dapat dikatakan sebagai Eropa yang tenang dan damai. Eropa pada waktu itu masih dipegang oleh raja-raja. Raja-raja, pangeran-pangeran, dan kaum aristokrat Eropa memiliki kekuasaan yang besar dalam pemerintahan. Sebagian besar negara-negara Eropa tersebut menjalankan bentuk pemerintahan monarki absolut. Selain mengendalikan pemerintahan, raja-raja Eropa terutama kaum aristokrat juga menjalankan sistem feodalisme dalam kepemilikan tanah.

Kekuasaan politik dimiliki oleh bangsawan dan pangeran, semuanya harus menunjukkan fungsi tradisionalnya. Dalam semua hal seseorang memiliki kepatuhan mendalam terhadap Tuhan, dan di bumi hal ini berarti kepatuhan terhadap sesuatu yang bersifat ketuhanan yang dibentuk secara duniawi. Hal itu merupakan filosofi yang cocok untuk seorang raja. Kaisar Francis II, lebih memilih untuk tidak merubah apapun, dia meyakini slogan aristokrasi lama "*ras manusia dimulai dari raja*" (Weiss, 1977: 35).

Revolusi Perancis muncul dengan tiba-tiba di Eropa tahun 1789. Revolusi sosial ini ternyata berdampak cukup besar bagi Eropa, karena mengancam kedudukan para raja (Nehru, 1966: 43), bahkan telah menjadi sebuah penghinaan yang besar bagi aristokrat dan gereja Katolik dan lebih berkembang menjadi penghinaan kepada monarki Perancis. Revolusi tidak hanya mencoba untuk

menghancurkan rezim lama di Perancis tapi juga menggoyahkan banyak fondasi di Eropa. Rakyat ingin menghapuskan kerajaan, feodalisme dan hak-hak gereja. Raja, kaum aristokrat dan pihak gereja melihat revolusi sebagai racun yang berbahaya. Itu semua menjadi sesuatu yang hebat dan mengejutkan bagi semua raja dan maharaja Eropa. Setelah Raja Louis XVI dipenggal kepalanya sebagai lambang kesewenang-wenangan raja, maka rakyat Perancis pun menebar ancaman yang sama terhadap raja-raja Eropa yang lainnya (Nehru, 1966: 58).

Jatuhnya Bastille adalah peristiwa yang besar dalam sejarah. Dengan diluapkannya revolusi itulah, menjadi tanda bagi rakyat untuk bangkit diseluruh negeri. Sebagian dari Eropa, yaitu Eropa yang beraja menentang Perancis. Perancis akan menunjukkan kepada raja-raja dan pangeran-pangeran Eropa, bagaimana rakyat dapat berjuang untuk meraih kemerdekaannya, juga untuk kemerdekaan dari semua orang yang ditindas oleh raja dan kaum bangsawan (Nehru, 1966: 59).

Revolusi perancis juga melahirkan sosok Napoleon Bonaparte yang lahir sebagai tokoh yang memperjuangkan revolusi. Dia ingin menyelamatkan revolusi. Jika dia mewujudkan Revolusi Perancis untuk pendukungnya dia juga mewujudkan ancaman revolusi bagi yang membencinya (Watson, 1981: 3).

Napoleon dilahirkan di Corsica Italia pada tahun 1769. Napoleon memasuki karir militer pada tahun 1785 sebagai petugas artileri Perancis. Setelah diangkat menjadi Brigadir Jenderal, kemudian Napoleon memasuki *Direktori*, dan mengeluarkan *Konstitusi VIII* sebagai tanda berakhirnya Revolusi Perancis,

seperti yang diungkapkan oleh Donald Kagan dalam bukunya "The Western Heritage Vol. II Since 1648".

Konsul memperoklamirkan akhir dari Revolusi Perancis

Pada proklamasi 15 Desember 1799, ketiga konsul baru dimana Napoleon salah satunya, menampilkan Konstitusi VIII tahun ini kepada orang Perancis dan dengan itu menyatakan akhir dari Revolusi Perancis.

Orang Perancis !

Sebuah konstitusi dibuat untuk kamu.

Konstitusi menentukan ketidakpastian dimana pemerintahan provisional diperkenalkan ke dalam hubungan eksternal, kedalam situasi internal dan militer republik.

Konstitusi ditempatkan di institusi dimana itu berdiri pertama membentuk magistrat yang curahannya tampak penting bagi keberhasilannya.

Konstitusi ditemukan karena tiga prinsip representatif pemerintah, terhadap kesucian hak asasi kepemilikan, kesamaan dan kebebasan.

Kekuatan dimana konstitusi membuatnya makin stabil, sebagaimana mereka bertujuan untuk menjamin hak asasi warga negara dan minat dari negara.

Warga negara, revolusi dibentuk atas prinsip-prinsip yang memulianya; konstitusi berakhir.

Setelah berhasil menggulingkan pemerintah Direktori pada tanggal 9 November 1799, kemudian Napoleon mendirikan *Konsulat* dan menjadi konsul pertama. Keberhasilannya dalam menjaga perdamaian, kemakmuran dan keamanan Perancis, pada tahun 1802 Napoleon diangkat menjadi konsul seumur hidup. Hal ini semakin melancarkan karirnya menjadi Kaisar Perancis kemudian diproklamasikan menjadi Napoleon I pada tanggal 18 Mei 1804 (Kagan, 1957: 661).

Setelah Napoleon menduduki tahta kekaisaran, semboyan revolusi yang selama ini ia perjuangkan *Liberty, Equality Dan Fraternity* (kebebasan, kesamarataan dan persaudaraan) ia lupakan. Akhirnya cita-cita Napoleon pun berubah ingin menguasai seluruh benua Eropa. Dalam pikirannya Napoleon ingin

menjadikan Eropa sebagai Satu Negara, Satu Kesatuan, Satu Hukum dan Satu Pemerintahan “ *akan kujadikan semua negara menjadi satu*” (Nehru, 1966: 92).

Hal ini dibuktikan selama masa kekaisarannya yang berlangsung dari tahun 1804-1814, Napoleon telah menaklukkan sebagian besar Eropa dengan merebut kemenangan dalam serangkaian kampanye militernya. Austria, Prusia, dan Rusia semuanya runtuh di depan Napoleon. Spanyol, Italia, Belanda, sebagian, Polandia, semuanya menjadi daerah taklukan Napoleon (Kagan, 1987: 82). Kemenangan Perancis telah merubah peta Eropa, dengan merusak batasan-batasan Internasional yang telah diatur sebelumnya. Pada tahun 1808 imperium Napoleon membentang dari Spanyol hingga perbatasan Rusia.

Setelah berkuasa hampir 10 tahun akhirnya bintang Napoleon mulai pudar. Diawali ketika pertempurannya di Leipzig Jerman pada tahun 1813, Napoleon tidak bisa menghadapi serangan dari koalisi antara Inggris dan Rusia. Ia menyerah, Napoleon turun dari tahta tanpa syarat pada tanggal 11 April 1814. Kemudian diasingkan ke Pulau Elba di Laut Tengah tidak jauh dari Italia (Marwati, 1988: 2).

Penggulingan Napoleon menimbulkan masalah tersulit dan rumit yang pernah dihadapi oleh para negarawan, terutama kaum konservatif dan aristokrat. Hampir seperempat abad, benua ini telah dirusak oleh perang, langsung atau tidak langsung melibatkan semua kekuatan, besar dan kecil. Selama masa peperangan batasan-batasan telah dirubah, negara lama telah dihancurkan, dipisahkan, dan dirubah sekehendak hati. Beberapa dinasti bersejarah telah tersapu dari tahtanya,

sistem sosial baru yang sah telah dibentuk secara luas dengan cara Perancis. Raja yang berkuasa dipaksa untuk menyerahkan senjata (Hazen, 1910: 210).

Semenjak mereka terlibat dengan revolusi dan perang, negara-negara Eropa melihat nostalgia Eropa beberapa tahun kebelakang sebelum terjadinya Revolusi Perancis tahun 1789. Eropa yang dimana pada saat itu mereka anggap sebagai Eropa yang sah. Francis I, kaisar Austria mendeklarasikan :

“My nation is like a worm-eaten house; if one parts is moved one cannot tell how much of it will fall.

Negaraku seperti rumah yang sudah dimakan sama cacing, ketika salah satu bagiannya dipindahkan kita tidak akan tahu seberapa banyak yang akan jatuh”.

Sosok dan pengaruh Napoleon yang luar biasa, mendorong negara-negara Eropa untuk bertemu di Kota Wina dalam rangka merekonstruksi kembali peta Eropa dalam sebuah kongres. Pada bulan September 1814, wakil-wakil dari negara Eropa mulai berdatangan ke Kota Wina. Disini rezim aristokrasi lama, dengan hati terbuka menyerahkan diri mereka dalam sebuah pesta yang berlebihan. Mereka yang hadir sebagian besar adalah raja-raja, pangeran-pangeran dan kaum bangsawan atau aristokrat yang selama ini keberadaannya terusik oleh Napoleon. Selama berlangsungnya, kongres didominasi oleh negara-negara yang termasuk dalam "Big Four" dan sebelumnya telah membentuk koalisi. Negara-negara tersebut yaitu, Inggris, Austria, Prusia dan Rusia yang telah mengirimkan wakil-wakilnya untuk hadir dalam Kongres Wina. Diantara mereka adalah para aristokrat terkenal Eropa, seperti Metternich dari Austria, Castlereagh dari Inggris, Hardenberg dari Prusia dan Tsar Alexander dari Rusia (Fisher, 1957 : 451).

Pertimbangan diselenggarakannya kongres ini karena tujuan utamanya adalah kaum aristokrat ingin mengembalikan tahta raja-raja yang diusir oleh Napoleon dan mengatasi masalah perbatasan wilayah. Selain itu juga ingin menghukum sekutu Napoleon dan memberi penghargaan kepada mereka yang telah berjuang melawannya. Singkatnya mereka berkumpul untuk memperbaharui rezim lama (Hoagland, 1960: 192).

Dibalik itu semua, Metternich yang menjadi kepala negosiasi lima besar (Inggris, Austria, Prusia dan Rusia) setelah Perancis diperbolehkan untuk mengirimkan wakilnya dalam kongres, menunjukkan niat untuk memperbaiki hubungan ke tahun 1789. Mereka ingin menyelesaikan perbedaan yang telah lama memisahkan mereka serta untuk menghindari perang dimasa yang akan datang (Tannenbaum, 1965 : 353).

Dalam kongres, kaum aristokrat mengaktualisasikan peran mereka dan berusaha untuk netral dengan mengesampingkan keegoisan pribadi demi kepentingan bersama yaitu terwujudnya perdamaian Eropa. Rencana kerja kongres tidak berjalan sebagaimana mestinya karena banyak perdebatan yang terjadi, terutama mengenai masalah Polandia dan Saxon. Sejak awal, Polandia dan Saxon memang menjadi perdebatan, dan menyita sebagian waktu kongres untuk mencari solusi yang terbaik.

Tsar Alexander dari Rusia menginginkan agar wilayah Duchy masuk dalam kerajaannya, begitupun dengan Herdenberg, rela memberikan sebagian Duchy kepada Rusia dengan mendapat kompensasi di tempat lain. Saxon adalah pilihan kompensasi dari Prusia. Masalah ini menjadi semakin rumit karena

Castlereagh dari Inggris dan Metternich yang mewakili Austria menolak hal tersebut.

Setelah melewati perdebatan yang begitu panjang, akhirnya kongres menghasilkan beberapa keputusan penting. Sebagian besar keputusan kongres merupakan hasil pemikiran para aristokrat, diantaranya adalah pembagian wilayah kompensasi terutama kepada negara-negara yang andil dalam menjatuhkan Napoleon. Prinsip legitimasi pun diberlakukan dengan maksud untuk mengangkat kembali kekuasaan para raja-raja Eropa, dengan maksud agar *ancient regime* dapat kembali ditegakkan.

Tulisan ini menyatakan bahwa selama 1804-1814, Eropa dihadapkan pada masalah konflik dalam menghadapi serangkaian peperangan dengan Napoleon yang ingin menguasai Eropa. Bagi para konservatif pengalaman dari revolusi Perancis merupakan sebuah pelajaran yang harus dihindari dan rezim lama yang kembali berkuasa makin berusaha untuk mempertahankan ideologi dan politik mereka sendiri. Permasalahan ini merupakan pikiran bagi para penguasa Eropa untuk keluar dan bebas dari bayang-bayang Napoleon terutama mereka ingin mengembalikan Eropa kepada pemerintahan Eropa lama.

Berdasarkan alasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai usaha-usaha negara Eropa untuk mewujudkan masa depan Eropa dalam sebuah pertemuan di kota Wina dari September 1814 sampai Juni 1815. Pertemuan tersebut membawa dampak bagi Eropa karena dapat mempertahankan perdamaian selama 100 tahun dan *ancient regime* pun dapat kembali berkuasa.

1.2 Rumusan Dan Pembatasan Masalah

Adapun permasalahan pokok yang hendak dikaji dalam penyusunan skripsi ini di rumuskan sebagai berikut **“Mengapa kaum aristokrat ingin mengembalikan Ancient Regime di Eropa?”**

Supaya tidak terjadi perluasan masalah dan pembahasan dapat terarah serta mengacu pada permasalahan pokok, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan sosial politik Eropa pada masa Napoleon Bonaparte?
2. Bagaimana kaum aristokrat mengaktualisasikan perannya dalam mengembalikan Ancient Regime di Eropa pada Kongres Wina 1814-1815?
3. Bagaimana hasil yang dicapai kaum aristokrat berdasarkan keputusan Kongres Wina 1814-1815 bagi Eropa?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dan kesesuaian dengan judul, maka penulisan skripsi ini memiliki tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan umum penulisan skripsi ini yaitu untuk memperkaya khasanah penulisan ilmiah, umumnya karya ilmiah sejarah dan khususnya penulisan sejarah kawasan Eropa bagian Austria. Tujuan secara khusus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengungkapkan keadaan sosial politik Eropa ketika berada di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte.
2. Mengkaji peranan-peranan atau strategi kaum aristokrat sebagai upayanya dalam mengembalikan ancient regime di Eropa.

3. Mengkaji keputusan yang dihasilkan Kongres Wina 1814-1815 terutama dampaknya bagi Eropa.

1.4 Penjelasan Judul

Judul yang penulis angkat adalah "*Kongres Wina 1814/1815: Peranan Kaum Aristokrat Dalam Upaya Mengembalikan Ancient Regime Eropa*".

Kongres, dapat diartikan sebagai sebuah pertemuan besar para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai pelbagai masalah. Kongres juga sering diistilahkan sebagai Muktamar atau rapat besar seperti pertemuan wakil-wakil negara untuk membicarakan suatu masalah. Kongres pada umumnya dilangsungkan untuk membahas masalah-masalah penting dalam organisasi. Satu hal sangat penting dalam kongres adalah penentuan kebijaksanaan masa yang akan datang bagi kehidupan organisasi tersebut. Kongres biasanya dihadiri para anggota pimpinan organisasi dan wakil-wakil dari seluruh cabangnya (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1990: 31).

Wina merupakan provinsi ke-sembilan Austria adalah ibukota negara dan merupakan sebuah kota besar di Eropa. Wilayah Wina seluas 414.9 Km dan penduduknya berjumlah 1.550.123 jiwa. Kota ini terletak di tepi Sungai Donau. Kota Wina menjadi tempat bersejarah di abad 19 karena tempat diselenggarakannya sebuah pertemuan negara-negara besar Eropa untuk merumuskan Eropa di masa depan (Negara & Bangsa, 1990: 20).

Aristokrat dapat diartikan yaitu penganut cita-cita kenegaraan yang berpendapat bahwa negara harus diperintah oleh kaum bangsawan atau orang

kaya dan orang-orang yang tinggi martabatnya. Dari kumpulan para aristokrat inilah lahir jenis pemerintahan aristokrasi, yaitu pemerintahan atau kekuasaan berada di tangan kaum bangsawan atau pemerintahan kaum bangsawan.

Ancient Regime, adalah sebutan bagi pemerintahan lama di Eropa, dimana sebagian besar Eropa pada waktu itu berbentuk kerajaan monarki. Pada masa ancient regime ini kekuasaan berada di tangan golongan aristokrat yang berhaluan konservatif atau kolot. Menurut kaum aristokrat bahwa Eropa yang sah adalah Eropa sebelum terjadinya Revolusi Perancis dan berada di bawah kekuasaan Ancient Regime.

Dengan demikian, pengertian dari judul "*Kongres Wina 1814-1815: Peranan Kaum Aristokrat Dalam Upaya Mengembalikan Ancient Regime Eropa*", mengungkapkan upaya negara-negara Eropa dalam mengembalikan kedudukan rezim konservatif, dan mengembangkan legitimasi atau pemerintahan tradisional agar berkuasa dan mencegah terjadinya revolusi politis atau untuk mempertahankan status quo terutama setelah kejatuhan Napoleon Bonaparte, diantaranya, membangun kembali keseimbangan kekuasaan antar negara-negara Eropa, membuat perencanaan Eropa secara politik dan terkontrol yang akan mencegah invasi dari kekuatan yang lebih besar. Sehingga dengan terlaksananya Kongres Wina ini negara-negara Eropa dapat duduk berdampingan untuk membicarakan masa depan Eropa yang lebih baik terutama untuk mencegah kemunculan kembali mimpi buruk Napoleonik.

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

1.5.1 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa di masa lampau seperti yang dikemukakan oleh Gottschalk (1975: 32) bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau dan hasilnya berupa rekonstruksi imajinatif atau historiografi. Sedangkan menurut Helius Sjamsuddin (1996: 63) metode sejarah adalah bagaimana mengetahui sejarah.

Kedua pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa metode sejarah dalam penelitian sejarah merupakan tahap untuk menjelaskan tentang masa lampau melalui rekonstruksi berdasarkan proses pengumpulan data, menyeleksi data, kategorisasi data, pengujian dan penganalisisan sumber yang telah teruji serta rekonstruksi tersebut yaitu berbentuk penjelasan masa lampau melalui penulisan sejarah atau disebut historiografi.

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan (Ismaun, 1992: 125-126), antara lain:

1.5.1.1 Heuristik

Tahap ini merupakan tahapan pertama dalam penelitian sejarah yaitu mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Cara yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber, buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu “Kongres Wina 1814-1815: Peranan Kaum Aristokrat Dalam Upaya Mengembalikan Ancient Regime Eropa”. Penulis disini

berusaha mengumpulkan sejumlah sumber dengan melakukan kunjungan ke berbagai perpustakaan antara lain, perpustakaan UPI, UNPAD, UNPAR, BALKOT, GEDUNG SATE, PUSNAS, CSIS dan Angkatan Darat (AD). Di samping itu browsing ke situs-situs internet juga dilakukan untuk mencari sumber-sumber yang tidak penulis dapatkan dari kunjungan ke perpustakaan.

1.5.1.2. Kritik atau Analisa Sumber

Kritik, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, baik isi maupun bentuknya (internal dan eksternal). Kritik internal dilakukan oleh penulis untuk melihat layak tidaknya isi dari sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan skripsi. Kritik eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang diperoleh, baik berupa buku maupun artikel.

1.5.1.3. Interpretasi

Pada tahap ketiga ini penulis menafsirkan fakta-fakta sejarah serta proses penyusunannya yang menyangkut seleksi sejarah. Fakta yang telah diperoleh tersebut dirangkaikan dan dihubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang selaras dimana peristiwa yang dimasukkan ke dalam konteks peristiwa lain yang melingkupinya.

1.5.1.4. Historiografi atau Penulisan Sejarah

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah, pada tahapan ini penulis menyusun dan membahas fakta-fakta yang ditemukan sehingga menjadi satu kesatuan sejarah yang tersusun dalam bentuk karya tulis

“Kongres Wina 1814-1815: Peranan Kaum Aristokrat Dalam Upaya Mengembalikan Ancient Regime Eropa”.

1.5.2 Teknik Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah teknik studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur ini dipergunakan penulis untuk mengumpulkan fakta dari berbagai sumber sejarah terutama literatur asing yang ditulis oleh para sejarawan dan pengamat politik. Serta dengan meneliti dan menganalisis tulisan-tulisan dalam artikel yang penulis temukan ketika browsing ke situs-situs internet. Setelah literatur terkumpul dan dianggap memadai untuk penulisan ini serta fakta-fakta ditemukan dan mendukung, penulis mempelajari, mengkaji, dan mengklasifikasikan serta memisahkan sumber-sumber yang kurang relevan dengan permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan memahami penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang garis-garis besar keseluruhan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Garis-garis besar tersebut diuraikan dalam beberapa sub bab terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan penulisan, penjelasan judul, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Kepustakaan

Pada bab ini akan berisi kajian berbagai literatur dari apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penemuan dari peneliti lain tersebut dijadikan sebagai landasan berfikir bagi penulis terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian serta teknik yang digunakan dalam penelitian dari mulai pencarian sumber, pengolahan sumber dan cara penulisannya.

Bab IV Kongres Wina dan Rekonstruksi Eropa

Bab ini akan berisi mengenai pemaknaan penulis terhadap jawaban-jawaban pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah.

Bab V Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap masalah-masalah secara keseluruhan setelah pengkajian pada bab sebelumnya.